

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Realisasi Anggaran

2.1.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menurut PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah laporan realisasi anggaran merupakan dasar tindakan yang dilaksanakan pemerintah yang terdiri dari rencana pendapatan, belanja, tranfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan tersusun berdasarkan klasifikasi tertentu secara teratur untuk jangka waktu satu periode. Menurut Runik (2014) laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang mencakup informasi yang berkaitan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dapat dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. dari LRA dapat diketahui terkait dengan sumber daya ekonomi yang akan didapat di masa depan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dan juga risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi terkait laporan keuangan yang berguna bagi pengguna LK untuk membuat keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang digunakan. LRA disampaikan guna menunjukkan unsur pendapatan, belanja, tranfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan dengan anggarannya dan dijelaskan dengan lebih rinci dalam CaLK yang berisi tentang hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran

2.1.2 Asas Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Ayu (2014) penyusunan LRA dipengaruhi oleh beberapa asas yang mengatur antara lain:

1. Asas terinci yaitu penyusunan secara sistematis untuk setiap sektor, program, proyek, atau kegiatan lainnya secara jelas.
2. Asas keseluruhan yaitu disusun berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam keuangan pemerintah.
3. Asas keterbukaan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan APBN kepada masyarakat dapat berupa dicetak pada media cetak dan presiden bertanggung jawab untuk membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Asas periodik yaitu penetapan pelaksanaan APBN dimana negara memperhatikan penerimaan enam bulan awal sebagai dasar dalam penetapan jumlah besarnya APBN dalam satu tahun.
5. Asas pembebanan yaitu kewajiban yang dibebani pengeluaran satu tahun pada saat kontrak atau pesanan ditandatangani, aktual seperti piutang dicatat sebagai penerimaan dan hutang dicatat sebagai pengeluaran dalam perhitungan satu tahun

anggaran, dan kas seperti penerimaan dicatat pada saat kas menerima uang dan pengeluaran dicatat pada saat kas membayar kewajiban negara.

6. Asas fleksibilitas dari segi legislatif yang dapat merevisi anggaran di setiap sektornya dan dari segi eksekutif yang dapat merevisi anggaran di setiap program atau kegiatan yang dijalankan.

2.1.3 Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP No. 2 Laporan realisasi anggaran menyajikan secara jelas struktur informasi dalam LRA yang terdiri dari:

1. pendapatan merupakan penerimaan yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.
2. belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau daerah atau entitas pemerintah lainnya yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
3. transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. surplus atau defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
5. pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun anggaran selanjutnya, yang dalam penganggaran pemerintah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam LRA harus diidentifikasi secara lengkap dan jelas di seluruh halaman laporan yang berkaitan dengan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. Cakupan entitas pelaporan;
3. Mata uang pelaporan;
4. Periode yang dicakup dalam laporan; dan
5. satuan angka yang digunakan.

2.1.4 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, laporan realisasi anggaran memuat di dalamnya ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang diatur oleh pemerintah pusat atau daerah dalam jangka waktu satu periode. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

Penyajian informasi terkait realisasi dan anggaran dalam LRA sebagai komponen laporan keuangan pemerintah secara tersanding untuk suatu periode. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berkaitan dengan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Periode pelaporan LRA disajikan paling sedikit sekali dalam setahun. Dalam situasi darurat tanggal laporan untuk entitas dapat berubah dan LRA tahunan

disampaikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun dan entitas wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut (Eduard et al., 2015)

2.1.5 Tujuan dan Manfaat LRA

Berdasarkan pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 paragraf 1 dan 2 tujuan LRA adalah menetapkan dasar dalam penyampaian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dan lainnya tujuan LRA adaah untuk menyampaikan pemahaman terkait dengan anggaran dan realisasi entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan tersebut disajikan untuk menunjukkan tingkat capaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Bastian (2006) tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk menerapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Ayu (2014) dari LRA pengguna dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran yang dimilikinya dengan:

1. penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi.

2. penyediaan informasi yang berkaitan dengan realisasi anggaran secara lengkap yang berfungsi bagi pengguna untuk dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dari laporan realisasi anggaran akan didapat informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima di masa depan untuk dapat digunakan dalam mendanai kegiatan pemerintah pusat atau daerah. Laporan realisasi anggaran berkaitan dengan indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah digunakan dan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggaran dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan manfaat LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 paragraf 6 bertujuan memberikan informasi realisasi pendapatan, belanja, tranfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan yang dapat diperbandingkan. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggarannya.

2.1.6 Kebijakan Akuntansi LRA

Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran diterapkan pedoman untuk menyusun pos-pos dalam LRA, penyusunan pos-pos ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 yang terdiri dari:

1.1.1.1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran akan menguraikan kegiatan

keuangan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan dengan cara menganalisis dan mengawasi. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran dapat meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang terdiri dari otorisasi kredit anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

1.1.1.2. Akuntansi Pendapatan

Dalam akuntansi istilah pendapatan dibagi dalam dua yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah sedangkan pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu pembukuan dengan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal badan layanan umum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Untuk pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelum dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah.

1.1.1.3. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Dibagi ke dalam dua sub kecil yaitu belanja dengan klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat dan belanja dengan klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah. Contoh klasifikasi belanja ekonomi adalah sebagai berikut:

Belanja operasi:

- belanja pegawai xxx
- belanja barang xxx
- bunga xxx

- subsidi xxx
- hibah xxx
- bantuan sosial xxx

Belanja modal:

- belanja aset tetap xxx
- belanja aset lainnya xxx
- belanja lain-lain/tak terduga xxx

2. Klasifikasi organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Dibagi dalam dua sub kecil yaitu belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat seperti belanja perkementerian negara atau lembaga beserta unit organisasi dibawahnya dan belanja menurut organisasi di pemerintah daerah seperti belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. klasifikasi fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh klasifikasi belanja berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut

Belanja:

- Pelayanan umum xxx
- Pertahanan xxx
- Ketertiban dan keamanan xxx
- Ekonomi xxx
- Perlindungan lingkungan hidup xxx
- Perumahan dan pemukiman xxx
- Kesehatan xxx

- Pariwisata dan budaya xxx
- Kesehatan xxx
- Agama xxx
- Pendidikan xxx
- Perlindungan sosial xxx

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja.

1.1.1.4. Akuntansi Surplus/defisit

Bagian dari laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos surplus atau defisit. Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

1.1.1.5. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Akuntansi terkait dengan pembiayaan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto.

Penerimaan pembiayaan dapat berupa penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum seperti: pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3. Akuntansi pembiayaan netto merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos pembiayaan netto.

1.1.4.6. Akuntansi Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan pos terakhir dalam laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.